



PEMKOT GENJOT DIGITALISASI KEUANGAN

Tingkatkan Efisiensi, Minimalisir Kebocoran PAD

YOGYA (KR) - Pemkot Yogyakarta menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah. Langkah ini diambil guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta meminimalisir kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (12/3), Walikota Yogyakarta Hasto Wardoyo menekankan digitalisasi adalah kunci utama dalam modernisasi birokrasi. Dirinya menyoroti perluasan sistem pembayaran digital, khususnya melalui QRIS di sektor parkir. Menurutnya, penggunaan transaksi non-tunai tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga memiliki fungsi pengawasan yang ketat.

"Dengan semakin banyaknya titik parkir yang menggunakan sistem pembayaran digital, kita bisa menutup celah aksi 'nutuk' tarif atau pungutan di luar ketentuan. Semuanya tercatat secara sistematis," tegasnya.

Pada tahap awal terdapat 100 titik parkir yang sudah menerapkan sistem pembayaran digital. Kini tengah diperluas hingga 350 titik lainnya. Ditargetkan pada akhir tahun ini seluruh titik parkir yang mencapai sekitar 700 lokasi sudah dilengkapi sistem QRIS.

Sebagai langkah nyata, Hasto mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyusun roadmap digitalisasi. Fokus utama ke depan adalah menerapkan sistem QRIS di seluruh titik parkir dan pembayaran sewa lapak pedagang pasar di wilayah Kota Yogyakarta.

Hasto menambahkan, terkait performa keuangan, data triwulan pertama tahun 2026 menunjukkan adanya kesenjangan antara pendapatan dan belanja. Saat ini, realisasi pendapatan telah mencapai 18 persen, namun realisasi belanja daerah masih tertahan di bawah 10 persen.

Untuk memperkecil kesenjangan tersebut, Pemkot akan menggenjot sektor belanja daerah, salah satunya dengan meningkatkan frekuensi dan nominal transaksi melalui Kartu Kredit Indonesia (KKI). Penggunaan KKI diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan barang dan jasa serta memastikan transaksi yang lebih akuntabel.

Sebagai informasi, capaian digitalisasi pendapatan daerah di Yogyakarta tergolong tinggi. Pada tahun 2025 lalu, realisasi pendapatan yang dibayarkan melalui kanal digital tercatat mencapai 72 persen. Capaian ini didorong oleh berbagai inovasi seperti aplikasi nontunai hingga sistem jemput bola ke masyarakat.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY Sri Darmadi Sudibyo, memberikan apresiasi atas langkah progresif Pemkot Yogyakarta. Ia menyebut Yogyakarta sebagai daerah yang inovatif dan sering menjadi pembaruan dalam sistem digitalisasi. Namun, ia mengingatkan agar aspek belanja daerah lewat KKI terus ditingkatkan, baik dari sisi volume maupun nominalnya.



KR-Ardhi Wahdan

Para pemangku kebijakan TP2DD Kota Yogyakarta di sela High Level Meeting (HLM).

Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama Bank BPD DIY Santoso Rohmad selaku pemegang Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) menyatakan kesiapannya mendukung penuh program TP2DD. Dalam acara tersebut, Bank BPD DIY juga menyerahkan bantuan perangkat transaksi digital yang dapat digunakan oleh OPD untuk mempermudah operasional nontunai.

Sebagai penutup rangkaian acara, dilakukan peluncuran aplikasi pemesanan tiket Taman Pintar secara daring. Inovasi ini diharapkan semakin memanjakan wisatawan dengan proses reservasi yang lebih praktis dan terintegrasi secara digital.

(Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005